

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

2009

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.5, LD.2009/NO.5 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

- | | | |
|----------------|---|---|
| ABSTRAK | : | <ul style="list-style-type: none">– Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan kepada pemerintahan desa dalam menyusun peraturan desa sehingga sesuai dengan Peraturan yang berlaku perlu menyusun pedoman Penyusunan Peraturan Desa, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Desa.– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2007.– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Jenis dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Desa, Pembahasan dan Kedudukan Peraturan Desa, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Peraturan Desa. |
| Catatan | : | <ul style="list-style-type: none">– Perda ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 2009– Penjelasan 3 hlm |

SUMBER PENDAPATAN DESA

2009

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.6, LD.2009/NO.6 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU SUMBER PENDAPATAN DESA

- | | | |
|----------------|---|--|
| ABSTRAK | : | <ul style="list-style-type: none">– Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Sumber Pendapatan Desa secara sah sesuai Ketentuan yang berlaku, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2007.– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sumber pendapatan Desa terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">a. Pendapatan asli Desa meliputi: hasil usaha Desa; hasil kekayaan Desa; hasil swadaya dan partisipasi; hasil gotong royong dan; lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi : bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;d. Sumbangan dari pihak ketigae. Pinjaman Desa. |
| Catatan | : | <ul style="list-style-type: none">– Perda ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 2009– Penjelasan 3 hlm |

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes)

2009

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.7, LD.2009/NO.7 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes)

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan pertimbangan agar terbentuknya Lembaga Perekonomian yang mandiri dan tangguh, serta guna meningkatkan sumber pendapatan asli desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Prosedur Dan Mekanisme Pembentukan BUMdes, Manfaat dan Tujuan pembentukan BUMDes bagi pemerintahan desa, Susunan Kepengurusan BUMDes, Tugas Dan Kewajiban Kepengurusan, Kewajiban Dan Kewenangan Badan Pengawas, Permodalan Badan Usaha Milik Desa, Pembagian Sisa Hasil Usaha, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga, Mekanisme Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban, Kewajiban Pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDes, Peran BPD, dan Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 2009
 - Penjelasan 4 hlm

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2009

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.10, LD.2009/NO.10 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU :78 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2005, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 4 Tahun 2007.

Catatan

:

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: asas umum pengelolaan keuangan daerah; pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; struktur APBD; penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; penyusunan dan penetapan APBD; pelaksanaan dan perubahan APBD; penatausahaan keuangan daerah; pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; pengelolaan kas umum daerah; pengelolaan piutang daerah; pengelolaan investasi daerah; pengelolaan dana cadangan; pengelolaan utang daerah; pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; penyelesaian kerugian daerah; pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal
- Penjelasan 24 hlm

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2009

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.10, LD.2009/NO.7 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

- | | | |
|----------------|---|--|
| ABSTRAK | : | <ul style="list-style-type: none">– Bahwa berdasarkan pertimbangan agar terbentuknya Lembaga Perekonomian yang mandiri dan tangguh, serta guna meningkatkan sumber pendapatan asli desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2008.– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Prosedur Dan Mekanisme Pembentukan BUMdes, Manfaat dan Tujuan pembentukan BUMDes bagi pemerintahan desa, Susunan Kepengurusan BUMDes, Tugas Dan Kewajiban Kepengurusan, Kewajiban Dan Kewenangan Badan Pengawas, Permodalan Badan Usaha Milik Desa, Pembagian Sisa Hasil Usaha, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga, Mekanisme Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban, Kewajiban Pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDes, Peran BPD, dan Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten. |
| Catatan | : | <ul style="list-style-type: none">– Perda ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 2009– Penjelasan 4 hlm |